

PESANTREN, LEMBAGA PENDIDIKAN SEKALIGUS KOMUNITAS ISLAM YANG KHAS, SEBUAH AKULTURASI BUDAYA

A. Qomaru Zaman*

Abstract

Pesantren (Islamic Boarding School) is a traditional institution for Muslims, founded among 13th-15th century, which teaches the importance of religious morality to guide everyday behavior. In its development, the schools not only teach religious sciences, but also general science. Instead of educational and social institution, Pesantren is as well as religious broadcasters institutions. The students' community actually is an Islamic society which consists of groups of students bound together by tradition and systems, custom and law "ecology" unique and rarely found its similarity to other communities outside of schools. The traditional Pesantren is a form of cultural acculturation outcomes of Indonesian with Islam. The tradition of local school is a religious phenomenon that has the function of connecting between Islamic values with the culture of Indonesia, and eventually formed the National Islamic nation state. As the concept of nationalism, this paradigm can be used for the purposes of normative constitutional foster as a sense of nationalism. With the acculturation culture model, Indonesia will be free from formalism primordial of Islam and local customs.

Keywords: Pesantren (Islamic boarding school), traditional, Islamic, cultural acculturation.

A. Pendahuluan

Pengertian Pesantren

Diakui secara umum bahwa referensi atau buku-buku yang membicarakan perihal pesantren belum begitu banyak. Tidak aneh apabila sampai sekarang ini istilah pesantren belum menemukan kata sepakat. Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pesantren, maka pendapat para pakar perlu diketengahkan.

Menurut Manfred Ziemek, pondok pesantren terdiri dari dua kata yakni pondok dan pesantren. Pondok berasal dari kata *funduq* (bahasa Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi imbuhan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Sering juga dianggap sebagai gabungan kata, *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren berarti tempat pendidikan manusia baik-baik (Wahjoetomo, 1997: 70).

Sedangkan Clifford Geertz berpendapat, bahwa pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India *Shastri* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Geertz menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari pura Hindu. Sama dengan pendapat C. G. Berg (1988: 6), yang mengungkapkan bahwa santri berasal dari kata India *shastri* yang berarti orang yang tahu kitab-kitab suci (Hindu), seorang ulama. Adapun *shastri* diturunkan dari kata *sastra* yang berarti kitab suci atau karya keagamaan, atau ilmiah. Dalam hubungan ini, kata *Jawa Pesantren*, yang diturunkan dari kata *shastri* mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Berarti pusat pendidikan tradisional Islam atau pondok untuk para siswa Muslim sebagai model sekolah agama Islam di Jawa.

Pendapat lain menyatakan bahwa pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik-baik. Ada pula yang mengartikan pesantren sebagai sekolah berasrama untuk mempelajari agama Islam (Taufik Abdullah, 1983: 328-

329). Dengan melihat latar belakang perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Belanda, Syafii Maarif(1987: 56), mendefinisikan pesantren sebagai pusat belajar tradisional bagi umat Islam dan umumnya berlokasi di daerah pedesaan.

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mastuhu(1994: 55), bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan "tradisional" bagi umat Islam, yang umumnya berlokasi di daerah pedesaan, untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, sehingga diharapkan santri menjadi orang yang bermanfaat. Di pesantren inilah kiai, ustadz, santri, dan pengurus pesantren hidup dalam satu area sehingga membentuk suatu komunitas. Oleh karena itu pesantren sering dikatakan sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebuah komunitas.

Pengertian "tradisional" dalam batasan di atas bukan berarti ketinggalan zaman atau tidak mengalami perubahan, tetapi menunjuk bahwa institusi atau lembaga ini hidup sejak ratusan tahun yang lalu (300-400 tahun). Institusi ini telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat.

Sejarah Perkembangan Pesantren

Pesantren memang telah berusia sangat lama, namun secara pasti kapan pesantren pertama kali didirikan tidaklah mudah untuk diungkap. Dari fakta-fakta

historis menunjukkan bahwa penyebaran Islam secara intensif terjadi pada abad ke-13 M sampai akhir abad ke 17- M. Pada masa ini berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Aceh, Demak, Giri, Gowa Tallo di Makasar, dan juga Ternate/Tidore. Dari pusat-pusat inilah kemudian Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui para pedagang, wali, ulama, serta mubalig dengan mendirikan pesantren, masjid, dan surau. Dapat disimpulkan bahwa pesantren telah mulai dikenal di Nusantara dalam periode abad ke-13-17, dan di Jawa sekitar abad ke-15-16 M. Dengan kata lain, di Jawa ketika Wali Songo mulai menyebarkan Islam, maka model pesantren-pun mulai didirikan dan dikembangkan, sekitar awal abad ke-15 M (Zaini Muchtarom, 1988: 20-22).

Pada masa abad ke-17-18, pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat terasa sangat berbobot, terutama dalam bidang penyiaran agama maupun bidang sosial keagamaan. Pesantren menjadi panutan masyarakat sekitarnya dalam bidang moral. Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat pengembangan Islam.

Masa kolonial Belanda, perkembangan pesantren mulai dihambat dan dihalangi. Bahkan tidak hanya pesantren, tetapi aktivitas masyarakat Muslim untuk menjalankan agamanya juga dibatasi. Meskipun demikian lembaga pesantren tidaklah mati sama sekali. Pesantren masih bertahan walau dalam kondisi terjepit.

Pada abad ke-19 pesantren dapat bangkit dan berkembang pesat setelah membuka pendidikan sistem baru, yakni pendidikan sistem madrasah. Di sisi lain, penindasan Belanda terhadap masyarakat menimbulkan kebencian dan penentangan yang luas. Kebencian dan penentangan pesantren terhadap Belanda dimanifestasikan dalam tiga bentuk: *pertama*, uzlah atau pengasingan diri, menyingkir ke tempat terpencil yang jauh dari jangkauan kolonial; *kedua*, bersikap non-kooperatif (tidak bekerja sama dengan Belanda) dan mengadakan perlawanan secara diam-diam; *ketiga*, memberontak

dan mengadakan perlawanan fisik terhadap Belanda (Wahjoetomo, 1997:77-78 dan Aqib Suminto, 1996: 50). Dalam perspektif sejarah, pondok pesantren sering mengadakan perlawanan secara silih berganti selama berabad-abad untuk mengusir Belanda dari bumi persada Nusantara. Misalnya, P. Antasari, Hasanuddin, Sultan Agung, P. Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan sebagainya.

Semangat dan loyalitas pesantren dalam hal bela negara juga dibuktikan pada masa perang kemerdekaan. Selama revolusi fisik (1945-1948), pesantren mengerahkan laskar-laskar seperti *Hizbullah*, bahu membahu dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Tidak sedikit pesantren yang dijadikan markas perjuangan dan gudang senjata. Di samping barisan *Hizbullah* juga barisan *Sabillillah*, anggotanya para santri yang sampai sekarang masih banyak dan terus menekuni profesi kemiliteran hingga pension (Wahjoetomo, 1997: 90).

Mastuhu (1994: 42), menjelaskan bahwa banyak para santri membentuk barisan *Hizbullah* yang kemudian menjadi salah satu embrio bagi Tentara Nasional Indonesia. Ciri khas angkatan darat pada masa awalnya menggambarkan adanya corak kepesantrenan. Hal ini dijelaskan oleh Boland dalam bukunya "Pergumulan Umat Islam di Indonesia", bahwa pembentukan *Hizbullah* mungkin penting artinya karena banyak para anggotanya yang kemudian menjadi tentara nasional. Hal ini berarti bahwa dalam ketentaraan Indonesia ada kehadiran santri Muslim yang berarti. Ciri khas angkatan darat berbeda dengan angkatan laut dan udara yang para perwira dan bawahannya berasal dari latar belakang yang lebih "sekuler". Mungkin sekali perbedaan suasana dalam tentara ini terus terasa akibatnya sampai kejadian 30 september 1965, dan peristiwa sesudahnya. Lahimya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan "Gentlemen Agreement", kesepakatan kehormatan, juga

tidak lepas dari jasa atau ikut sertanya alumni pesantren. Dilihat dari dunia luar, dokumen tersebut memang kecil, tetapi jika kita ingin menoleh lebih ke belakang untuk melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Negara dan Islam di Indonesia sebagian besar akan ditentukan oleh beberapa perkataan dalam dokumen ini (Boland, 1985: 14).

Semangat para santri yang demikian besar untuk berjuang disebabkan adanya keinginan mati syahid dalam rangka membela agama, dan doktrin yang kuat dari pesantren bahwa cinta dan membela tanah air termasuk sebagian dari iman. Siapapun yang mengaku beriman, maka sebagai tandanya harus ikut berjuang dan berperang.

Uraian tersebut menggambarkan sebagian bukti bahwa pesantren mampu mengemban tantangan zamannya, sehingga bobotnya di mata masyarakat dan bangsa cukup tinggi.

Clifford Geertz sendiri melukiskan tentang akulturasi budaya sebagai penyambung dua budaya (Hindu-Buda dan Islam), memiliki esensi kultural yang mengacu pada tradisi pesantren. Dengan kata lain tradisi pesantren merupakan gejala religius lokal yang memiliki fungsi penyambung antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Indonesia, hingga pada akhirnya akan terbentuk *nation state* Islam Nasional. Sebagai wawasan kebangsaan, paradigma tersebut bisa dijadikan konstitusi normatif untuk keperluan memupuk rasa nasionalisme. Dengan model akulturasi budaya, maka Indonesia akan terbebas dari formalisme primordialisme Islam dan adat-istiadat lokal. Primordialisme berpotensi besar bagi disintegrasi nasional (Zubaidi Habibullah Asya'ari, 1996: 22).

B. Sistem Pendidikan Pesantren

Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan juga lembaga penyiaran agama. Ketiga

fungsi ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sehubungan dengan ketiga fungsi ini, maka pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, tampak bahwa fungsinya sebagai lembaga pendidikan menjadi semacam ujung tombaknya, sedangkan dua fungsi yang lain menjadi semacam sayap sebelah kiri dan kanannya.

Erat kaitannya dengan ketiga fungsi tersebut, pesantren lebih menunjukkan orientasi kehidupannya ke masyarakat pedesaan daripada ke masyarakat perkotaan. Hal ini terlihat pada sikap dan perilaku warga pesantren yang menghargai tinggi nilai kebersamaan dan keharmonisan. Manusia diperlakukan demi kebulatan hubungan dengan kodrat alam semesta, lingkungan masyarakatnya, dan dengan dirinya sendiri sebagai makhluk pencari kebenaran ilahiah.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, tujuan pendidikan pesantren tidaklah sama atau tidak seragam. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, mampu berdiri sendiri, menyebarkan agama di tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah. Pada dekade 1970-an, terjadi perubahan yang cukup besar pada eksistensi pesantren. Pesantren sebagai sebuah bentuk sistem pendidikan tradisional, mulai berubah. Jika sebelumnya sistem pendidikan pesantren dikenal sebagai bentuk sistem pendidikan non-sekolah (kelas *bandongan* tradisional), yang muncul kemudian justru sebaliknya. Bentuk-bentuk sistem pendidikan sekolah mulai masuk ke dalam komunitas pesantren, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah,

Aliyah, SLTP/SMU, perguruan tinggi keagamaan bahkan perguruan tinggi umum.

Memang hadirnya sistem persekolahan ini tidak dengan serta merta menggusur sistem pengajaran tradisional yang selama ini dikenal. Antara lain *sistem bandongan*, artinya belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Sistem sorogan, yakni belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang ustadz/kiai, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Sistem *halaqah* yakni diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar-salahnya isi kitab. Selain itu juga digunakan sistem hafalan (Mastuhu, 1994: 61). Pengajaran tradisional ini tetap dilaksanakan hanya kadarnya saja yang berkurang, atau pelaksanaannya bersifat massal karena jumlah santri yang sangat banyak.

Dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Lebih dari itu, pesantren mengembangkan sistem pendidikan yang heterogen, yakni mendidik santri dengan sistem madrasah dan mendisiplinkan praktek ibadah. Sementara ada juga pesantren yang santrinya belajar (ilmu umum) di luar pesantren, tanpa mengharuskan untuk mengikuti program pendidikan di pesantren. Hal ini cukup beralasan karena banyaknya pesantren yang berkembang di perkotaan (Tim Peneliti UMS, 1990: 50).

Di samping ketrampilan yang sudah umum di pesantren seperti bertani, dan beternak, tahun 1970-an berbagai ketrampilan seperti perbengkelan, pertukangan, elektronika, menjahit dan sebagainya, mulai diperkenalkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan atau orientasi santri dari pandangan hidup yang terlalu berat pada *ukhrowi* sehingga menjadi seimbang dengan orientasi kehidupan *duniawi*.

Sejak dua dasa warsa terakhir ini telah banyak buku-buku agama Islam yang

berisi pembaruan pemikiran dalam Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia masuk ke pesantren dan dipelajari oleh santri dan kiai-kiai muda. Hal ini membawa dampak luas yang menggetarkan seluruh jaringan kehidupan pesantren sehingga lebih terbuka dengan sistem lain di luar dirinya.

Sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren dan pendekatan *holistik* yang digunakan serta fungsinya yang komprehensif sebagai lembaga pendidikan, sosial dan penyiaran agama, maka perlu diketengahkan prinsip-prinsip sistem pendidikan pesantren (Mastuhu, 1994: 62-66), yaitu:

1. *Teosentris*, bahwa semua kejadian berasal, berproses, dan kembali pada Tuhan. Semua aktivitas pendidikan dipandang merupakan bagian integral dari totalitas kehidupan sehingga belajar di pesantren tidak dipandang sebagai alat tetapi sebagai tujuan.
2. *Sukarela dan mengabdikan*, berhubung dengan semua aktivitas pendidikan pesantren dipandang sebagai ibadah, maka penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan mengabdikan kepada sesama dalam rangka mengabdikan kepada Tuhan.
3. *Kearifan*, dalam hal ini bersikap dan berperilaku sabar, rendah hati, patuh pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain, dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.
4. *Kesederhanaan*, maksudnya berpikir dan bersikap wajar, proporsional dan tidak tinggi hati.
5. *Kolektivitas*, kebersamaan dipandang lebih tinggi daripada individualisme.
6. *Mengatur kegiatan bersama*, semua kegiatan kokurikuler diatur bersama sepanjang tidak menyimpang dari akidah agama dan tata tertib pesantren.
7. *Kebebasan berpimpin*, maksudnya sikap pesantren dalam melaksanakan pendidikan adalah membantu dan mengiringi anak didiknya, tetapi

pesantren juga keras berpegang pada tata tertib pesantren terutama pada hukum agama.

8. *Mandiri*, santri mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri.
9. *Pesantren* adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan.
10. *Mengamalkan ajaran agama*, pesantren sangat mementingkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
11. *Tanpa ijazah*, keberhasilan belajar di pesantren bukan ditandai ijazah, tetapi ditandai oleh prestasi kerja yang diakui masyarakat dan direstui kiai.
12. *Restu kiai*, semua perbuatan yang dilakukan warga pesantren tergantung pada restu kiai.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa setiap pesantren mempunyai ciri dan penekanan tersendiri, hal ini tidak berarti lembaga-lembaga pesantren itu benar-benar berbeda. Sebab sistem yang digunakan pada suatu pesantren juga diterapkan di pesantren lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu untuk menggolongkan pesantren ke dalam tipologi tertentu tidaklah mudah. Ada yang menggolongkan pesantren menjadi pesantren Salaf (tradisional) dan pesantren Khalaf (modern). Pembagian ini tentu tidak bersifat ekstrim, sebab sistem pengajaran yang diterapkan di pesantren salaf juga dipakai di pesantren khalaf. Begitu pula model kelembagaan di pesantren *khalaf* banyak diterapkan di pesantren salaf dalamnya. Para ustadz dan pembantu lainnya berkedudukan sebagai tenaga operasional.

Sedangkan pesantren khalaf (modern) adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah umum, seperti SMP, SMU, atau perguruan tinggi dalam lingkungannya. Akan tetapi tidak berarti pesantren khalaf meninggalkan sistem salaf. Ternyata hampir semua pesantren khalaf meskipun

telah menyelenggarakan sekolah umum, tetap menggunakan sistem *salaf* di pondoknya.

Dibandingkan dengan pesantren *salaf*, pesantren *khalaf* memiliki satu nilai plus, karena materi pendidikannya lebih lengkap meliputi pendidikan agama dan umum. Para santri pesantren *khalaf* diharapkan lebih mampu memahami aspek-aspek keagamaan dan keduniaan agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik dengan kehidupan modern. Meskipun demikian, tidak berarti pesantren *khalaf* lebih bermutu daripada pesantren *salaf*. Dengan masuknya berbagai ilmu umum dan ketrampilan ke pesantren, bila tidak waspada, identitas pesantren sebagai lembaga pencetak ulama, pengembang, dan pelestari ajaran Islam akan memudar. Aktivitas pendalaman Islam akan tergeser oleh kegiatan lain yang sebenarnya lebih cocok dilakukan lembaga lain. Dikhawatirkan pada akhirnya pesantren tidak berbeda dengan lembaga-lembaga umum lainnya.

Mengenai hubungan kiai dengan kelembagaan pada pesantren *khalaf*, berbeda dengan pesantren *salaf*, yakni segala kekayaan dan bangunan pesantren umumnya tidak dianggap milik kiai tetapi milik masyarakat. Sebab pembiayaan pada pesantren *khalaf* tidak hanya dari kiai, tetapi juga dari masyarakat. Walaupun begitu, tidak berarti karisma dan kekuasaan kiai berkurang, kiai tetap mempunyai kekuasaan mutlak atas kepengurusan pesantren.

C. Ciri yang Membedakan Pesantren dengan Luar Pesantren

Uraian-uraian di atas pada dasarnya merupakan gambaran secara khusus mengenai komunitas pesantren yang membedakan dengan lingkungan komunitas luar pesantren.

Pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, di mana kiai, ustadz, santri dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu area, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma

kebiasaannya sendiri yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum di luar pesantren.

Dalam lingkungan pesantren semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan halal-haram, wajib-sunat, baik-buruk, dan sebagainya didasarkan pada hukum agama dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan. Dengan kata lain, semua kegiatan kehidupan selalu dipandang dalam struktur relevansinya dengan hukum agama. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan lingkungan masyarakat luar pesantren.

Di dalam pesantren otoritas kiai begitu dominan dan sangat dihormati. Santri mempunyai kewajiban taat dan tunduk kepada kiai hampir-hampir sampai pada batas mutlak. Seperti digambarkan Abdurrahman Wahid, bahwa seorang kiai dan para pembantunya merupakan satu-satunya hirarki kekuasaan yang diakui di pesantren. Kekuasaan kiai bersifat mutlak atas para santrinya, santri merasa terikat dengan kainya sepanjang hidupnya, setidak-tidaknya sebagai sumber ilham dan bantuan moral bagi kehidupan perorangannya (Syafii Maarif, 1987: 56-57).

Gaya kepemimpinan paternalistik ini berlaku di pesantren pada umumnya. Sebagai pembimbing, kiai menganggap dirinya orang tua, partner, dan guru yang siap menerima dan membina segala keluhan dan kesulitan yang dialami oleh santri untuk dicari solusinya. Model/gaya kepemimpinan seperti ini tentu tidak dijumpai dalam masyarakat pada umumnya di luar lingkungan pesantren. Ada perbedaan mental yang sangat menyolok antara komunitas santri di lingkungan pesantren dengan masyarakat di luar pesantren. Di dalam pesantren berlaku model kebersamaan, keterbukaan dan keikhlasan santri. Kepemilikan barang di luar pesantren mutlak atas nama pribadi. Tidak ada barang pribadi yang di atasnamakan milik bersama, kecuali barang yang didapat secara kolektif. Persepsi ini

menimbulkan mental *sense of belonging* yang tinggi terhadap milik pribadi. Puncaknya timbul sikap arogan dan pengagungan yang berlebihan terhadap milik pribadi.

Sebaliknya, sifat kepemilikan komunitas santri tidak atas nama pribadi. Kepada "harta bendanya" santri memiliki persepsi kolektif. Setiap santri tidak merasa keberatan membantu sesama santri, karena mental mereka sudah dibentuk secara egalitarian oleh lingkungan pesantren. Mental seperti ini menimbulkan sikap gotong-royong, kebersamaan dan sosialisme. Tetapi ini bukan berarti tidak menghargai milik pribadi sesama santri. Sebab rasa kebersamaan di antara mereka diimbangi oleh pengakuan dan penghayatan terhadap harta benda temannya (Zubaidi Habibullah Asya'ari.1996: 55-59)

Komunitas santri sebenarnya merupakan masyarakat Islam yang terdiri atas kelompok-kelompok anak didik yang saling terikat oleh tradisi dan sistem, kebiasaan serta hukum "ekologi" yang khas dan jarang ditemui kesamaannya pada komunitas lain di luar pesantren.

Kehidupan bersama khas pesantren adalah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok santri hidup bersama di suatu wilayah tertentu, sama-sama berbagi iklim, serta "makanan" yang sama. Kehidupan masyarakat santri bersifat fitrih. Di satu pihak, kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya, dan kegiatan sehari-hari, pada hakekatnya bersifat masyarakat Islam, dan sistem ini akan tetap ada/berlangsung selama pembagian dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tradisi dan sistem keislaman. Di pihak lain, gagasan-gagasan ideal, tingkah laku, kebiasaan khas santri dapat memberikan mereka satu rasa kesatuan. Dengan kata lain, masyarakat santri adalah suatu kelompok manusia di bawah pemenuhan serangkaian dan pengaruh seperangkat kepercayaan, ideologi dan tujuan

tersatukan sampai melebur dalam rangkaian hidup bersama.

Gambaran penuh kebersamaan pada komunitas santri jarang kita temui pada komunitas luar pesantren. Masyarakat luar pesantren merupakan deskripsi sosial yang penuh kepura-puraan, kontradiktif, formalistis dan ekspansif. Masing-masing individu berusaha menekan individu lain. Jabatan dan kekayaan difungsikan sebagai simbol kedudukan dan menjadi instrumen kekuasaan yang makin lama makin menekan kelompok kecil. Ditambah lagi oleh pengingkaran secara simultan terhadap sistem makna dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sebuah gambaran gejala komunikasi sosial yang semakin memperjauh persaudaraan dan kekerabatan.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan dan kemasyarakatan antara lingkungan pesantren dan lingkungan luar pesantren. Perbedaan ini mungkin akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap terhadap berbagai sikap setiap orang yang ada di masing-masing lingkungan tersebut.

D. Tradisi Pesantren Sebuah Akulturasi Budaya

Kredibilitas pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan sangat ditentukan oleh kredibilitas kiai sebagai pengajar. Karena itu berdirinya sebuah pesantren tidak semata-mata ditandai oleh adanya unsur kiai, santri, dan sarana prasarana. Ada sebuah proses panjang bagi seorang ulama untuk diakui dan diterima oleh lingkungannya. "Umumnya harus dimulai dengan adanya pengakuan oleh lingkungan masyarakat agama (Islam), keshalihan perilaku maupun ketegasan serta keberanian seorang ulama menghadapi segala macam gangguan yang mengancam diri pribadi maupun lingkungannya"(Chairul Anam, 1985).

Pengakuan masyarakat terhadap seorang kiai, bukan semata-mata ditandai oleh kedalaman ilmunya. Juga oleh peranannya sebagai pemimpin informal bagi

lingkungannya: sebagai tempat bertanya segala macam masalah, meminta fatwa dan perlindungan. Itu sebabnya dalam perkembangannya pesantren berkembang menjadi sebuah komunitas khusus. Pada komunitas khusus ini, seorang kiai tampil sebagai seorang pemimpin yang penuh karismatik sehingga masyarakat tunduk kepadanya dengan sukarela. Keterikatan antara kiai sebagai pemimpin komunitas sekaligus sebagai sumber inspirasi dan sumber ilmu juga sebagai panutan begitu kental. Dalam kapasitas seperti inilah santri dan masyarakat sekitarnya menyatakan diri untuk “taat tanpa reserve”. Ciri seperti ini selalu melekat pada kondisi psikologis seorang santri (Zubaidi Habibullah Asy’ari, 1995: 10-11).

Dalam masyarakat santri, tradisi pesantren adalah sebuah sintesis. Artinya budaya ini diakui sebagai salah satu kultur yang harus dipertahankan eksistensinya. Menurut K.H. Abdurrahman Wahid “pesantren tidak dapat lagi dilihat sebagai sebuah sub-kultur dalam artian gejala unik dan terpisah dari dunia luar”. Sementara Hadimulyo menyebut pesantren sebagai institusi kultural untuk menggambarkan sebuah budaya yang mempunyai karakteristik sendiri, tetapi juga membuka diri terhadap pengaruh dari luar. Kuntowijoyo menulis bahwa pesantren tidak dapat digambarkan semata-mata sebagai sektor tradisional. Selanjutnya, membuat tipologi tentang gejala yang sedang mengalami perubahan memang selalu akan terjatuh ke dalam simplikasi yang berlebihan. Melihat pesantren sebagai lembaga tua tanpa mengenal watak-watak barunya tidak akan menolong dalam analisis sosial dunia pesantren (Zubaidi Habibullah Asy’ari: 1995: 20)

Tradisi pesantren merupakan salah satu bentuk budaya hasil akulturasi budaya Indonesia dengan ajaran Islam. Karena itu tradisi pesantren tidak dapat ditemui di negara Islam lain kecuali hanya Indonesia. Akulturasi budaya ini bisa terjadi akibat impulse universalis Islam. Di samping

menimbulkan dampak negatif juga membawa banyak dampak positif. Pengaruh budaya lokal terhadap ajaran Islam sudah bukan merupakan hal yang baru. Studi dan seleksi yang intens yang dilakukan cendekiawan Muslim kemudian melakukan pilihan yang pantas diambil dan mana yang harus dibuang.

Clifford Geertz sendiri melukiskan tentang akulturasi budaya sebagai penyambung dua budaya (Hindu-Buda dan Islam), memiliki esensi kultural yang mengacu pada tradisi pesantren. Dengan kata lain tradisi pesantren merupakan gejala religius lokal yang memiliki fungsi penyambung antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Indonesia, hingga pada akhirnya akan terbentuk *nation state* Islam Nasional. Sebagai wawasan kebangsaan, paradigma tersebut bisa dijadikan konstitusi normatif untuk keperluan memupuk rasa nasionalisme. Dengan model akulturasi budaya, maka Indonesia akan terbebas dari formalisme primordialisme Islam dan adat-istiadat lokal. Primordialisme berpotensi besar bagi disintegrasi nasional (Geertz, 1963).

Munculnya primordialisme keagamaan dan kedaerahan memperlihatkan keadaan yang sangat kontras jika dibuat suatu perbandingan sejarah Indonesia, demikian pula dengan ajaran Islam. Pada masa lampau tercatat betapa banyak tokoh/pejuang kemerdekaan diantaranya dari ulama(pesantren), begitu gigih memainkan peran sebagai protagonis nasionalisme. Mereka menyerukan kepada masyarakat untuk menanggalkan loyalitas kedaerahan, kesukuan, keagamaan, serta menggantikannya kepada loyalitas kebangsaan atau nasionalisme.

Hingga saat ini primordialisme masih dianggap salah satu faktor yang mengancam kesatuan bangsa. Primordialisme sekarang ini diartikan tidak hanya menolak orang atau suku bangsa lain dengan agama dan adat - istiadatnya, melainkan juga membenci dan mencurigainya. Pikiran hati dan hidupnya hanya dipusatkan secara eksklusif pada diri dan kelompoknya (Alex Lanur, 1995:

49). Dengan demikian, pesantren yang pada dasarnya merupakan manifestasi akulturasi budaya, seperti uraian Geertz di atas, menjadi salah satu wahana untuk mengurangi primordialisme.

Salah satu hal yang paling menonjol dalam tradisi pesantren adalah corak kepemimpinan paternalistik, dimana otoritas kiai begitu dominan dan sangat dihormati. Santri mempunyai kewajiban taat dan tunduk kepada kiai hampir-hampir sampai pada batas mutlak. Seperti digambarkan Abdurrahman Wahid, bahwa seorang kiai dan para pembantunya merupakan satu-satunya hirarki kekuasaan yang diakui di pesantren. Kekuasaan kiai bersifat mutlak atas para santrinya, santri merasa terikat dengan kainya sepanjang hidupnya, setidaknya sebagai sumber ilham dan bantuan moral bagi kehidupan perorangannya.

Menurut beberapa sumber hal ini terjadi dikarenakan faktor psikologis. Sebagai seorang yang sudah dewasa, kiai dipercaya memiliki kelebihan, kiai menempati posisi puncak di mata santri, hal mana menjadikan santri merasa dirinya kecil. Sehingga ia menganggap semua ilmu yang ada padanya tidak berarti apa-apa di depan kiai. Pengaruh kejiwaan tersebut terefleksi dalam bentuk tingkah laku, aktivitas, perbuatan dan kerja yang dilakukan oleh santri.

Padahal bagi kiai sendiri keberadaannya tidaklah seperti yang digambarkan santri tersebut. Sebagai pembimbing, kiai menganggap dirinya sebagai orang tua, partner, dan guru yang siap membina serta menerima keluhan dan kesulitan yang dialami santri, untuk kemudian dicarikan solusinya agar santri terbebas dari segala permasalahan.

Corak kepemimpinan pesantren inilah yang kemudian tetap terbawa oleh santri dan diterapkan ketika ia menghadapi berbagai persoalan. Kiai dalam konteks pesantren khususnya dan kalangan Nahdhatul Ulama umumnya merupakan sosok yang harus dijunjung tinggi karena kelebihan khusus dan harus ditaati (Mastuhu, 1984: 55-56). Posisi

kiai semakin kokoh di mata santri karena kiai (ulama) adalah pewaris para Nabi. Sebagai pewaris Nabi, kiai harus dihormati dan ditaati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib Suminto, 1996, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES.
- Boland, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafiti Pers.
- Brown, Jacques and Henry E. Graff, 1970, *The Modern Researcher*, New York, Harcourt Brace & World Inc.
- Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Habibullah Asy'ari, Zubaidi, 1996, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta, LPKSM.
- Lanur, Alex, 1995, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Problema dan Tantangannya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mastuhu, 1984, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS.
- Saefuddin Azwar, 1995, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sax, Gilbert, 1980, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*, Belmon, Wadsworth Publishing Company.
- Syafii Maarif, Ahmad, 1987, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES.
- Taufik Abdullah, 1983, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Tim Peneliti UMS, 1990, *Cita-Cita dan Pandangan Hidup Santri Studi Kasus Pesantren di Popongan dan Mangkuyudan*, Surakarta, LPUMS.

Wahid Zaini, 1994, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta, LKPSM.

Wahjoetomo, 1997, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta, Gema Insani Press.

Zaini Muchtarom, 1988, *Santri dan Abangan di Jawa*, Jakarta, INIS.

Zubaidi Habibullah Asya'ari, 1996, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta, LKPSM.